

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2026

PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2027

Mewujudkan Sinergi Pusat dan Daerah untuk Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas

Temanna #LABEDDU

Fondasi Pembangunan: Sinergi & Amanat Hukum



Tiga Dimensi Strategis RKPD



Dua Jangkar Utama Penyusunan RKPD 2027

Khusus Provinsi DIY berpedoman pada RPJMD 2022-2027.

Berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Hasil Evaluasi.

Capaian kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2025.

RKPD 2027

Tema Pembangunan Nasional (Kewajiban Penyelarasan Daerah)



WAJIB: Pemerintah Daerah **diwajibkan menyelaraskan tema RKPD daerah dengan tema pembangunan nasional 2027.**

Target Makro Nasional 2027

5,9% – 7,5%

Laju Pertumbuhan Ekonomi

6,0% – 6,5%

Tingkat Kemiskinan

0% Target Kemiskinan Ekstrem

4,30% – 4,87%

Tingkat Pengangguran Terbuka

0,575

Indeks Modal Manusia

Ekosistem Visi Presiden: Translasi Asta Cita



RKPD 2027 daerah diwajibkan secara eksplisit menjabarkan visi ini ke dalam arsitektur program prioritas daerah.

Translasi Asta Cita: Kelompok Prioritas Nasional 1-4

PN 1

Kokohkan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM.



PN 2

Swasembada Pangan, Energi, Air, dan Ekonomi Digital/Hijau/Biru.



PN 3

Infrastruktur dan Lapangan Kerja Berkualitas.



PN 4

Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, dan Kesehatan.



Translasi Asta Cita: Kelompok Prioritas Nasional 5-8



Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) / Quick Wins – Tahap I

Makan siang dan susu gratis
di sekolah dan pesantren



Pemeriksaan kesehatan gratis
dan penuntasan kasus TBC



Pembangunan sekolah unggul
terintegrasi di setiap kabupaten





TAHAP EKSEKUSI & TATA KELOLA

Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027 Bagian II

Dari Mandat Strategis Menuju Realisasi Daerah.

Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) - Bagian II



Kesejahteraan Aparatur

Kenaikan gaji ASN (Guru, Tenaga Kesehatan, Penyuluh) serta TNI/POLRI.



Papan Berkualitas

Penyediaan rumah murah berkualitas yang ditargetkan untuk Milenial, Gen Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).



Perlindungan Absolut

Keberlanjutan Kartu Kesejahteraan Sosial sebagai instrumen utama untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

Mandatory Spending: Komitmen Tak Bisa Ditawar

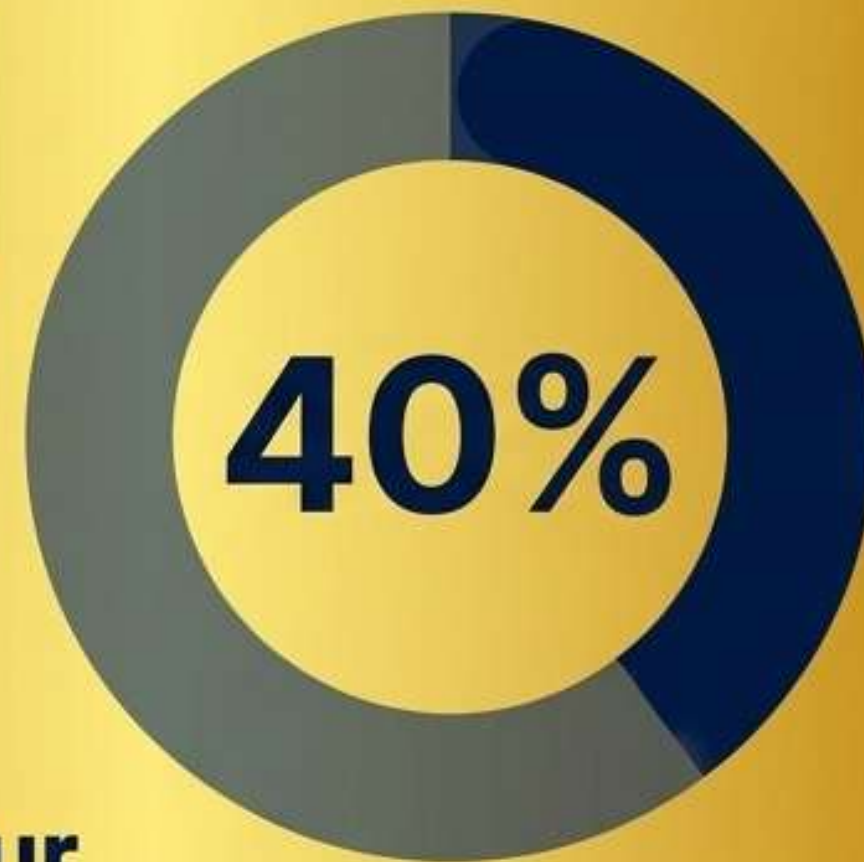


Pendidikan

Akselerasi SDM

Fokus alokasi: Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan.

Prioritas utama: Mendukung program digitalisasi pembelajaran & Penuntasan kasus Anak Tidak Sekolah (ATS).



Infrastruktur Pelayanan Publik

Daya Ungkit Ekonomi

Wajib mengalokasikan minimal 40% (dari total belanja APBD, di luar belanja bagi hasil/transfer).

Fokus alokasi: Penciptaan perluasan lapangan kerja & penguatan infrastruktur pelayanan publik dasar.

Sinergi Episentrum: Integrasi Proyek Strategis Nasional (PSN)

Arahan Eksekusi

Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan dan mengintegrasikan PSN yang berlokasi di wilayahnya ke dalam dokumen RKPD 2027.

Konteks Strategis

PSN bukan sekadar proyek titipan pusat, melainkan episentrum pertumbuhan ekonomi lokal yang akan mengungkit kesejahteraan daerah sekitarnya.

Sentralisasi Ekosistem Digital: Tata Kelola SIPD

Satu Data, Satu Sistem.



Agenda Kerja & Tahapan Utama



The Ultimate Deadlines - Batas Waktu Penetapan RKPD 2027



Otoritas: Gubernur
Penetapan Provinsi Maksimal

JUNI 2026



Otoritas: Bupati / Wali Kota
Penetapan Kabupaten/Kota Maksimal

JULI 2026

Minggu Pertama

*Atau selambat-lambatnya 7 hari kerja
setelah penetapan RKPD Provinsi.

Sistematika Dokumen RKPD 2027



Ruang Fleksibilitas: Pemicu Perubahan RKPD



The Golden Rules: Eksekusi RKPD 2027



RKPD 2027: Responsif, Terukur, Berkelanjutan

Dokumen ini bukan sekadar rutinitas administratif tahunan. RKPD 2027 adalah instrumen strategis pertama kita untuk memastikan akselerasi pembangunan daerah selaras dengan lompatan besar bangsa.

**Satu Sinergi,
Menjemput
Indonesia Emas 2045**